



PENTINGNYA LITERASI BAGI PENINGKATAN KUALITAS PEMUDA

Elga Andina*)

Abstrak

Daya literasi pemuda masih rendah. Padahal, daya literasi seseorang memengaruhi kompetensi kognitif lain seperti kreativitas dan kemampuan berpikir kritis, yang merupakan modal untuk menghadapi tantangan jaman yang semakin berat. Kondisi ini disebabkan: (1) belum kuatnya pendidikan literasi di institusi pendidikan; (2) lingkungan yang tidak mendukung peningkatan literasi; dan (3) sulitnya akses buku. Meskipun DPR RI bersama Pemerintah telah membuat Undang-Undang No. 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (UU Sisbuk) yang bertujuan mendorong peningkatan kualitas literasi bangsa, belum ada langkah fundamental yang dilakukan dalam mengubah sistem pendidikan kita. Oleh karena itu, DPR perlu mendorong pemerintah untuk segera mengeluarkan peraturan pelaksanaannya. Dalam fungsi pengawasannya DPR juga harus mendorong pemerintah untuk merevisi kurikulum pendidikan agar mendukung peningkatan daya literasi dan menekan harga buku sesuai dengan amanat UU Sisbuk.

Pendahuluan

Data Susenas 2015 menyebutkan jumlah pemuda Indonesia mencapai 61,68 juta jiwa atau 24,2% dari jumlah penduduk Indonesia. Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Sedangkan UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) memiliki rentang usia lebih rendah, yaitu 15

sampai 24 tahun, yang menunjukkan masa transisi dari ketergantungan di masa kanak-kanak menuju kemandirian masa dewasa dan mulai berkembangnya kesadaran akan saling ketergantungan dengan orang lain. Untuk kesamaan persepsi, tulisan ini akan menggunakan definisi UNESCO mengenai rentang usia pemuda.

Pada rentang usia ini, perkembangan kognitif individu memasuki tahap formal operasional. Menurut Piaget (dalam Papalia, Old, & Wenkos, 2008: 555), fase ini ditandai

*) Peneliti Muda Psikologi pada Bidang Kesejahteraan Sosial, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.
Email: elga.andina@gmail.com

dengan proses berpikir menjadi semakin logis dan tidak lagi tergantung pada hal-hal yang langsung dan nyata saja. Artinya, ia dapat membayangkan dan menganalisa sesuatu secara abstrak tanpa pertolongan benda atau kejadian konkret. Ia mampu mempertimbangkan beberapa pandangan; membedakan argumen dan fakta; membuat hipotesis; berpikir deduktif dan induktif; serta mampu menggunakan perbandingan, korelasi, probabilitas, kombinasi, dan permutasi. Orang-orang pada tahap operasi formal dapat mengintegrasikan apa yang telah mereka pelajari dengan tantangan di masa mendatang dan membuat rencana untuk masa datang (Papalia, Old, Feldman, 2008: 555). Dalam pembelajaran, individu tidak berperan sebagai penerima informasi pasif, namun ia harus mampu mengkoneksikan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimilikinya terlebih dahulu. Di sinilah daya literasi berperan. Mereka yang memiliki daya literasi akan memiliki kompetensi untuk menggali dan menemukan informasi yang dibutuhkan agar berfungsi optimal dalam kehidupan. Daya literasi seseorang memengaruhi kompetensi kognitif lain seperti kreativitas dan kemampuan berpikir kritis. Kompetensi tersebut merupakan kompetensi dasar yang diharapkan perusahaan dari calon pekerja. Keduanya merupakan modal untuk menghadapi tantangan jaman yang semakin berat.

Pada tahun 2016, hampir tidak ada pemuda yang tidak bisa membaca dan menulis. Dalam Statistik Pemuda 2015 ditunjukkan bahwa hanya 43,57% pemuda di Indonesia yang melakukan kegiatan membaca dalam seminggu terakhir. Minat membaca pemuda yang tinggal di perdesaan masih lebih rendah dibandingkan dengan pemuda di perkotaan (30,94%:54,94%).

Karena kemampuan membaca dipengaruhi oleh lamanya seseorang dibina di institusi pendidikan, maka semakin tinggi tingkat pendidikan semakin tinggi daya literasinya. Akibatnya, semakin tinggi pula daya tawarnya di dunia kerja. Permasalahannya, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dalam Renstra 2016-2019 mengakui bahwa 0,9% pemuda tidak pernah sekolah dan 42,97% putus sekolah, serta hanya 7,50% pemuda lulus perguruan tinggi, yang menjadi tantangan untuk

mendapatkan pekerjaan layak. Akibatnya, 45,27% pemuda bekerja masih dibayar dengan upah di bawah Rp1 juta pada tahun 2016.

Permasalahan lain adalah masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pemuda, yang merupakan indikator tantangan ketenagakerjaan pemuda. TPT pemuda Indonesia tahun 2016 mencapai 13,44%. Hal ini juga dipengaruhi kondisi pemuda lebih memilih menjadi karyawan/buruh dibandingkan berusaha sendiri (berwiraswasta), padahal jumlah lowongan kerja yang tersedia tidak seimbang dengan pelamar. Penyebaran pemuda yang tidak proporsional, di mana pemuda lebih banyak berkumpul di kota besar, menambah persaingan untuk mendapatkan kehidupan yang layak.

Kurangnya kontribusi signifikan pemuda di dunia kerja menyebabkan berbagai permasalahan sosial, seperti meningkatnya gejala degradasi moral termasuk penyalahgunaan narkoba, meningkatnya kriminalitas, premanisme, dan kekerasan di kalangan pemuda. Meskipun pemuda berkontribusi dalam gerakan sosial, namun cenderung terjerumus ke dalam politik praktis, tetapi kurang berperan dalam bidang pendidikan, olah raga, dan seni.

Permasalahan yang dipaparkan Kemenpora di atas tampaknya dapat kita cermati sebagai kondisi di mana kualitas pemuda masih belum memadai untuk dapat bersaing di dunia usaha. Tidak heran kondisi di atas menempatkan Indonesia dalam urutan 113 dari 188 negara dalam penilaian Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2016 (UNDP, 2016: 201). Oleh karena itu, kondisi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. Tulisan ini mengulas penyebab pentingnya mengembangkan budaya literasi bagi pemuda.

Apa Itu Literasi?

Secara sederhana, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan literasi sebagai kemampuan menulis dan membaca. Akan tetapi, permasalahan kemampuan membaca (dan menulis) tidak dapat direduksi menjadi melek huruf semata. UNESCO memberikan pemaknaan yang lebih mendalam dengan menyatakan bahwa literasi merupakan kemampuan untuk

mengidentifikasi, memahami, mengartikan, menciptakan, mengkomunikasikan, dan menghitung, menggunakan materi tercetak dan tertulis yang berkaitan dengan berbagai konteks. Membaca tidak sekedar mengenali huruf, namun juga mengolah huruf tersebut, menganalisa, kemudian memahaminya sehingga menjadi informasi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu, tepatlah kiranya definisi literasi yang tercantum dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (UU Sisbuk) yaitu “kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya.”

PISA (Programme for International Student Assessment) 2015 menunjukkan bahwa lebih dari setengah penduduk Indonesia berusia 15 tahun yang disurvei tidak dapat mengenali ide utama dalam suatu topik, memahami hubungan, atau menafsirkan makna dari bagian teks terbatas ketika informasi yang diberikan tidak menonjol. Kecakapan literasi dapat dijadikan ukuran kemampuan manusia (Green & Riddel, 2001, 2003, dalam Rosholm & Jensen, 2005). Meskipun literasi hanyalah sub-ukuran modal manusia, namun nyatanya sangat penting dalam masyarakat informasi dan pengetahuan di masa sekarang.

Penyebab Rendahnya Literasi

Di Indonesia, ada beberapa hal yang menyebabkan rendahnya literasi: *pertama*, belum kuatnya pendidikan literasi di institusi pendidikan. Kemampuan membaca dan menulis merupakan pondasi terciptanya kesenangan membaca. Orang akan menghindari kegiatan membaca jika kekurangan kosakata yang menyebabkannya sulit membaca. Kosakata dapat diperoleh dengan semakin banyak berlatih membaca, padahal kurikulum pendidikan kita tidak mendukung tumbuhnya budaya membaca. Misalnya, di luar negeri, peserta didik diberi tugas untuk menyelesaikan daftar bacaan dalam setahun, sedangkan di Indonesia belum ada program semacam itu.

Kedua, lingkungan yang tidak mendukung peningkatan literasi. Seseorang akan senang membaca ketika berada di lingkungan yang senang membaca. Ini

yang disebut Bandura sebagai *learning by modelling*, orang belajar dari mencontoh perilaku orang lain. Pemuda yang dibesarkan di keluarga yang suka membaca dan dibiasakan membaca buku, akan membentuk kebiasaan membaca.

Ketiga, sulitnya akses terhadap buku. Buku bukanlah komoditas prioritas bagi sebagian besar pemuda. Mereka akan berpikir dua kali untuk membeli buku, apalagi dengan harga buku yang semakin mahal karena proses distribusi yang tidak dikontrol pemerintah.

Solusi Yang Dapat Diambil

Rendahnya literasi disadari oleh berbagai lapisan masyarakat. Oleh karena itu muncullah gerakan-gerakan personal untuk mendorong peningkatan minat baca di berbagai daerah. Secara sporadis, kelompok-kelompok peduli pendidikan mengumpulkan buku dan membagikan buku kepada anak-anak di tempat terpencil.

Akan tetapi, gerakan-gerakan tersebut tentu tidak dapat menggantikan tugas negara untuk meningkatkan literasi bangsa, terutama generasi muda. Dalam UU Sisbuk, Pemerintah Pusat berwenang dalam menetapkan kebijakan pengembangan budaya literasi dan bertanggung jawab untuk meningkatkan minat membaca dan menulis melalui pengadaan naskah buku yang bermutu serta memfasilitasi pengembangan sistem informasi perbukuan. Tanggung jawab ini tidak dapat dijalankan hanya dengan memberikan buku ke sekolah atau membangun perpustakaan megah. Kegemaran membaca tidak dapat dipupuk sekedar dengan menambah fasilitas, namun perlu pembiasaan dan penguatan atau yang disebut Skinner dengan *operant conditioning*. Pengkondisian ini dimulai dari institusi pendidikan dasar, diawali dengan guru, diteruskan oleh kelompok peserta didik, diperkuat dengan *reinforcement* (penguatan) positif, yaitu item mendasar seperti materi, persahabatan, cinta, pujian, penghargaan, perhatian dan kesuksesan (Anwar, 2017: 50). Oleh karena itu, perubahan fundamental yang perlu dilakukan pemerintah antara lain: (1) merevisi kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang mendukung peningkatan daya literasi; dan (2) menekan harga buku sesuai dengan amanat UU Sisbuk.

Pengaturan Tentang Literasi

Permasalahan rendahnya literasi menjadi fokus Komisi X DPR RI. Pada awal tahun 2017 telah disahkan UU Sisbuk, yang bertujuan untuk meningkatkan daya literasi bangsa. Dalam peraturan tersebut, pemerintah diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk menyediakan sarana dan prasarana yang menghasilkan buku bermutu, murah, dan merata. Secara fisik, memang undang-undang tersebut lebih memfokuskan pada peningkatkan daya literasi di pendidikan dasar dan menengah yang merupakan pondasi budaya membaca di kalangan pemuda.

Hampir 1 tahun sejak UU Sisbuk disahkan, pemerintah belum mengeluarkan peraturan pelaksanaannya, yang berarti belum ada langkah konkret yang dijalankan pemerintah untuk mengubah cara pembelajaran literasi kita. Untuk itu, DPR RI melalui Komisi X seharusnya terus mendesak pemerintah agar dapat menerbitkan peraturan pemerintah/peraturan menteri sesuai dengan amanat undang-undang tersebut di atas. Selain itu, Komisi X juga harus mendorong pemerintah memperbaiki kurikulum yang mendukung peningkatan daya literasi serta menekan harga buku untuk meningkatkan akses terhadap buku.

Penutup

Pemuda adalah harapan untuk meneruskan dan menjaga keberlangsungan bangsa ini. Akan tetapi, dengan rendahnya kemampuan literasi pemuda, dikhawatirkan Indonesia tidak dapat bersaing dengan perubahan jaman. Rendahnya daya literasi disebabkan 3 hal: (1) belum kuatnya pendidikan literasi di institusi pendidikan; (2) lingkungan yang tidak mendukung peningkatan literasi; dan (3) sulitnya akses terhadap buku. Untuk itu perlu ada perubahan kurikulum pendidikan yang mendukung peningkatan daya literasi dan menekan harga buku sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 3 Tahun 2017. Oleh karena itu, Komisi X DPR RI harus mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengeluarkan peraturan pelaksana Undang-Undang No. 3 Tahun 2017 yang menyentuh perubahan mendasar dalam pendidikan yang mendukung literasi.

Referensi

- Anwar, Chairul. (2017). *Buku Terlengkap Teori-teori Pendidikan Klasik Hingga Kontemporer* (ed. Yanuar Arifin). Yogyakarta: IRCiSoD.
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Statistik Pemuda Indonesia 2016*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Daniel, S. S., Walsh, A. K., Goldston, D. B., Arnold, E. M., & al, e. (2006). Suicidality, school dropout, and reading problems among adolescents. *Journal of Learning Disabilities*, 39(6), 507-14. Retrieved from <https://search.proquest.com/docview/194226046?accountid=185286>.
- Jensen, T. P., & A. Holm. (2000). "Danskernes læse-regne-færdigheder – i et internationalt lys" (Prose literacy and mathematical literacy of the Danes – an international perspective), AKF Forlaget.
- OECD. (2000). "Literacy in the Information Age", Paris: OECD.
- Papalia, D.E., Old, S.W., & Feldman, R.D. (2008). *Human Development* (Psikologi Perkembangan, Edisi kesembilan). Jakarta: Kencana.
- Kefeli, H., & Bayraktar, A. (2014). The Determination Of Preschool Teachers' Awareness Related To Shared Reading. *International Journal of Arts & Sciences*, 7(2), 79-88. Retrieved from <https://search.proquest.com/docview/1644631640?accountid=185286>.
- Kemenpora. (2017). *Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2016-2019* (Edisi Revisi). Jakarta: Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- UNESCO, What do we mean by "youth"? <http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/youth/youth-definition/>, diakses 1 November 2017.
- United Nations (PBB). (2016). *United Nation World Youth Report: Youth Civic Engagement*. New York: United Nations Publication.
- Undang Undang No. 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan.
- UNDP. (2016). *Human Development Report 2016: Human Development for Everyone*. New York: United Nations Development Programme.